

1 TANPA
KEMISKINAN



unicef 
untuk setiap anak

LAMPIRAN

KOMPENDIUM PRAKTIK BAIK

demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
untuk anak di Indonesia

2021

1	Geunaseh: Program Perlindungan Sosial Untuk Anak yang Didanai Pemerintah Daerah	Aceh	2
2	Bantuan Langsung Tunai di Lombok 2018–2020: dari Gempa Bumi Hingga COVID-19	Nusa Tenggara Barat	4



Publikasi selengkapnya tersedia di tautan berikut:
www.unicef.org/indonesia/reports/compendium-of-good-practices



Geunaseh: Program Perlindungan Sosial Untuk Anak yang Didanai Pemerintah Daerah

Topik: Perlindungan sosial

Lokasi: Aceh (Kota Sabang)

Rangkuman Pendekatan

Pemerintah Kota Sabang dengan dukungan UNICEF dan Flower Aceh meluncurkan Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh) pada tahun 2019. Geunaseh adalah program perlindungan sosial yang didanai pemerintah kota dan merupakan bagian dari program terpadu untuk mengatasi gizi buruk pada ibu dan anak. UNICEF dan Flower Aceh memberikan dukungan teknis dalam penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan, komunikasi perubahan perilaku, dan sistem informasi yang terpadu.

Geunaseh dimaksudkan untuk mencegah potensi masalah kesehatan jangka panjang yang disebabkan gizi buruk melalui skema perlindungan sosial berupa bantuan tunai kepada rumah tangga penerima, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dan mengakses layanan kesehatan dasar.

Menurut Peraturan Wali Kota Sabang No. 21 Tahun 2019, Geunaseh merupakan program perlindungan sosial yang didanai pemerintah daerah dengan tujuan mewujudkan “Kota Sejahtera” sesuai dengan prioritas nasional. Pada awalnya, Geunaseh merupakan program percontohan untuk melengkapi program perlindungan sosial pemerintah lainnya yang ditujukan untuk menyejahterakan anak-anak, yang meliputi: program air bersih dan sanitasi, pengasuhan positif, manajemen kesehatan terpadu untuk anak usia dini, dan bantuan beasiswa tunai untuk pelajar berusia 7–17 tahun. Lewat gabungan berbagai inisiatif ini, Sabang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki program perlindungan sosial untuk semua anak di bawah 18 tahun.

Bantuan langsung tunai disalurkan langsung ke rumah tangga yang memiliki anak berusia 0–6 tahun, memiliki akta kelahiran dan tinggal di Sabang, atau yang tercantum dalam kartu keluarga. Keluarga penerima manfaat menerima uang tunai sebesar Rp150 ribu (10 dolar AS) per bulan yang dapat diambil di bank setempat.

Hasil Penting yang Dicapai

- Pada tahap awal, Geunaseh menjangkau 4.109 anak di 18 desa. Sampai Juni 2020, program tersebut menjangkau lebih dari 5.227 anak di seluruh Sabang.
- Pada bulan November 2019, 92 persen anak yang memiliki akta kelahiran, naik dari 92 persen pada tahun 2018. Enam hingga delapan persen dari kenaikan ini terjadi di Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya.
- Tingkat kehadiran anak-anak di puskesmas naik dari 62 persen pada bulan Agustus 2019 menjadi 92 persen pada bulan Juli 2020.



Replikasi/ peningkatan skala program	<p>UNICEF dan Flower Aceh tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sabang untuk merencanakan peta jalan lima tahun Geunaseh demi menjamin keberlanjutan program.</p>	
	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Materi komunikasi pembangunan (didanai oleh UNICEF) • Peningkatan kapasitas dan penyusunan regulasi (didanai bersama oleh UNICEF dan Pemerintah Sabang): Rp1,25 miliar (85.500 dolar AS). • Pengembangan sistem informasi manajemen, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras (didanai oleh UNICEF). • Bantuan langsung tunai, menyasar 5.000 anak berusia 0–6 tahun (didanai oleh Pemerintah Sabang): Rp9 miliar (620.000 dolar AS)/tahun.
	Keterampilan	<p>Keterampilan penyelenggaraan survei, pengelolaan program (termasuk <i>monitoring</i> dan evaluasi serta administrasi), komunikasi pembangunan, dan mobilisasi masyarakat.</p>
Pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan syarat kepemilikan akta kelahiran untuk mengakses bantuan Geunaseh dapat mendorong orang tua mencatatkan kelahiran anaknya secara resmi. Upaya tersebut bermanfaat bagi anak-anak dalam pemenuhan hak-haknya serta pemerintah dalam perbaikan data kependudukan. • Pencatatan kelahiran dapat ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa. Geunaseh mendorong orang tua yang kelahiran anaknya belum tercatat untuk melapor kepada kepala desa. • Kunjungan anak ke puskesmas dapat ditingkatkan melalui program perlindungan sosial yang didanai pemerintah daerah, agar koordinasi antara kebijakan sosial dengan layanan kesehatan meningkat. • Program perlindungan sosial yang didanai pemerintah daerah efektif salah satunya karena adanya desentralisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia. • Evaluasi terhadap dampak program Geunaseh pada angka kemiskinan dan kemiskinan anak masih diperlukan.
		Referensi dan informasi lebih lanjut
Informasi kontak	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Yoga Tama, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF – Banda Aceh (atama@unicef.org) • Faisal Azwar, S.T., M.T, Bappeda Kota Sabang (bappeda_sabang@yahoo.com) 	



Bantuan Langsung Tunai di Lombok 2018–2020: dari Gempa Bumi Hingga COVID-19

Topik: Perlindungan sosial adaptif, bantuan langsung tunai darurat
Lokasi: Nusa Tenggara Barat (Lombok Utara dan Lombok Timur)

Dari tahun 2018 hingga 2020, UNICEF Indonesia telah mengelola tiga program bantuan tunai darurat sebagai bagian dari rencana aksi strategi nasionalnya: “Sampai pertengahan 2019, lewat pemberian bantuan langsung tunai multisektor, keluarga dengan anak-anak berusia 0–6 tahun yang paling rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) dengan lebih baik.” Program tersebut meliputi:

Program	Periode	Mitra
Bantuan tunai multiguna untuk rumah tangga terdampak bencana alam di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	Desember 2018–Juni 2019	World Vision Indonesia (WVI)
Bantuan langsung tunai darurat untuk anak-anak terdampak bencana, Lombok Utara (Bantuan Tunai 1)	Desember 2018–Agustus 2019	Catholic Relief Services (CRS)
Bantuan langsung tunai darurat, Lombok Timur (Bantuan Tunai 2)	November 2019–September 2020	Catholic Relief Services (CRS)

Rangkuman Pendekatan

Bantuan Tunai bagi anak-anak terdampak bencana merupakan respons untuk gempa bumi dahsyat yang melanda Lombok pada pertengahan tahun 2018. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak yang memiliki anak berusia hingga enam atau tujuh tahun, perempuan hamil, dan ibu menyusui. Dampak gempa bumi pada masyarakat meliputi terganggunya mata pencaharian dan menurunnya pendapatan: 28 persen dari masyarakat terdampak tidak bisa kembali bekerja selama tiga hingga enam bulan, sedangkan 23 persen di antaranya tidak bekerja selama enam hingga 12 bulan. Penurunan pendapatan dialami 35 persen dari masyarakat yang terdampak akibat berkurangnya hari kerja, dihentikan dari tempat kerja, atau tingginya risiko dalam pekerjaan mereka yang sebelumnya.

Sebelumnya di Sulawesi Tengah, bantuan diberikan dalam skema tunai darurat multiguna (MPC) yang bersifat fleksibel dan tanpa syarat, sehingga penerimanya dapat membeli berbagai barang kebutuhan dan mengakses layanan dasar. MPC ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat intervensi UNICEF lainnya yang berkaitan dengan penguatan layanan publik dengan menyediakan bantuan keuangan bagi keluarga agar dapat membeli barang pangan dan nonpangan serta mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan WASH. Intervensi ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan World Vision International.



Di NTB, Bantuan Tunai 1 menysasar 4.200 penerima manfaat di enam desa di Lombok Utara. Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap dengan nilai total sebesar Rp4,45 juta (304 dolar AS) per rumah tangga. Untuk Bantuan Tunai 2, penyaluran diperluas ke Kabupaten Lombok Timur dengan menysasar 4.500 penerima manfaat di delapan desa di empat kecamatan. UNICEF, didukung Catholic Relief Services dan Pos Indonesia, menyalurkan Rp4 juta (274 dolar AS) kepada tiap penerima manfaat dalam tiga tahap di lokasi penyaluran di desa.

Berbeda dengan Bantuan Tunai 1 yang fokus utamanya adalah pemberian bantuan langsung tunai, untuk Bantuan Tunai 2, UNICEF juga melakukan advokasi kebijakan dengan: menguatkan kapasitas pemerintah daerah, mendorong disusunnya prosedur operasi standar dan pedoman terkait bantuan langsung tunai, dan menyusun tindakan pencegahan untuk keselamatan selama pandemi COVID-19. Selama berlangsungnya program Bantuan Tunai 1 dan 2. UNICEF mengadakan penelitian terkait pokok bahasan yang relevan, seperti:

- Studi kualitatif tentang bantuan langsung tunai darurat multiguna di Lombok Timur
- Studi jarak jauh terkait wawasan tentang COVID-19

Hasil Penting yang Dicapai

Bantuan Tunai 1

- 4.469 rumah tangga di enam desa menerima bantuan langsung tunai.
- 33,41 persen dari bantuan langsung tunai digunakan untuk kebutuhan pangan dan 66,59 persen untuk layanan dan kebutuhan dasar.
- Tiga mekanisme penanganan keluhan dibentuk, termasuk melalui saluran siaga (*hotline*) dan U-Report.
- Lima sesi pelatihan diadakan untuk organisasi mitra.

Bantuan Tunai 2

- 4.402 rumah tangga di delapan desa menerima bantuan langsung tunai.
- 68 persen bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (misalnya, makanan, produk WASH, dan peralatan sekolah), sedangkan 32 persen digunakan untuk mengakses layanan dasar (misalnya, transportasi ke sekolah/rumah sakit, pendaftaran program PAUD, dan layanan kesehatan).
- Lima mekanisme penanganan keluhan dibentuk.
- Lima pelatihan dan dua lokakarya terkait pelaksanaan program diselenggarakan untuk para mitra.
- Dua kegiatan kunjungan belajar diadakan dengan dua pemerintah daerah; satu tidak direncanakan

Replikasi/ peningkatan skala program

Diawali di Lombok Utara, Bantuan Tunai 1 diperluas hingga ke Lombok Timur sebagai Bantuan Tunai 2 yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses yang dimiliki keluarga terdampak ke kebutuhan dan layanan dasar.



	Biaya	<p>Bantuan Tunai 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan program: Rp676,9 juta (46.300 dolar AS) • Bantuan langsung tunai: Rp19 miliar (1,3 juta dolar AS) <p>Bantuan Tunai 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas untuk pemerintah (pelatihan dan kunjungan pertukaran pengetahuan): Rp69,4 juta (4.780 dolar AS) • Pengelolaan program: Rp1,4 miliar (96.000 dolar AS) • Bantuan langsung tunai: Rp19,9 miliar (1,37 juta dolar AS)
	Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Survei • Pemantauan • Penggunaan telepon seluler • Pengumpulan data • Latar belakang pengetahuan profesional
	Pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensos • Bappeda Provinsi NTT • Bappeda Kabupaten Lombok Timur • Dinas Sosial Provinsi • Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur • Pemerintah Kabupaten Lombok Timur • Pemerintah desa di empat kecamatan • Sukarelawan masyarakat • Kader posyandu
Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk situasi pascabencana, Bantuan Tunai lebih diutamakan diberikan hingga perekonomian pulih (walaupun masyarakat juga mau menerima bantuan berupa barang). Menurut hasil evaluasi, sebagian besar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga; mewujudkan ketahanan pangan/gizi, pendidikan, dan pengeluaran terkait kesehatan untuk anak merupakan prioritas utama. • Anak-anak memperoleh manfaat paling besar. Menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama terbukti menjadi strategi yang efektif karena orang tua terdorong memprioritaskan kebutuhan anaknya. Secara umum, bantuan memberikan manfaat bagi anak-anak (53 persen), anggota keluarga lainnya (41 persen), ibu (5 persen), dan ayah (1 persen). • Intervensi dengan bantuan tunai membantu perempuan untuk menabung, menghasilkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas produktifnya. Dari studi evaluasi gender, diketahui bahwa perempuan membangun kembali dan mengembangkan mata pencaharian informal, sehingga meningkatkan peluangnya untuk bangkit serta menjadi mandiri dan tangguh. 	



	<ul style="list-style-type: none">• Berbagi informasi dan komunikasi rutin terkait kemajuan program diperlukan, misalnya, untuk meningkatkan sosialisasi. Seluruh masyarakat, baik penerima manfaat maupun bukan, harus tahu tentang program, kriteria kelayakan dan pengecualian terkait penerimaan manfaat, jadwal penyaluran bantuan, dan dokumen yang diperlukan.• Pedoman standar yang disediakan pemerintah pusat dan subnasional serta sistem identifikasi penerima manfaat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, misalnya, dalam menentukan penerima manfaat yang memenuhi syarat.• Pelaksanaan 'Pedoman Penyaluran Bantuan secara Aman' untuk COVID-19 oleh pemerintah desa dan daerah efektif meningkatkan keamanan dan mengurangi kerumunan yang terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai.• Integrasi TIK/aplikasi CommCare dalam proyek Bantuan Tunai sangat berguna pada tahap registrasi dan pemantauan karena pengumpulan data menjadi lebih valid dan pencatatan laporan menjadi lebih baik. Pemerintah daerah tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut dan telah mengujicobanya selama pelaksanaan kegiatan pemantauan dan belajar bersama.
Referensi dan informasi lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none">• <i>Cash-based assistance for earthquake and tsunami affected children in Central Sulawesi and Lombok Province</i> (2 halaman)• <i>The State of Children in Indonesia: Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children's Rights</i> - https://www.unicef.org/indonesia/reports/state-of-childreninindonesia-2020• UNICEF <i>Annual Report 2019</i> - https://www.unicef.org/indonesia/reports/annual-report-2019• Berita lokal: Distribusi Bantuan Tunai Multiguna dari UNICEF (https://senarulombokutara.desa.id/rst/artikel/202-Distribusi-Bantuan-Tunai-Multiguna-Dari-Unicef)
Informasi kontak	<ul style="list-style-type: none">• Annisa Srikandini, Manajer Program UNICEF (asrikandini@unicef.org)• Iyan Kusmadiana, Kepala Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam, Direktorat PSKBA, Kementerian Sosial (iyan.kusmadiana@gmail.com)

